

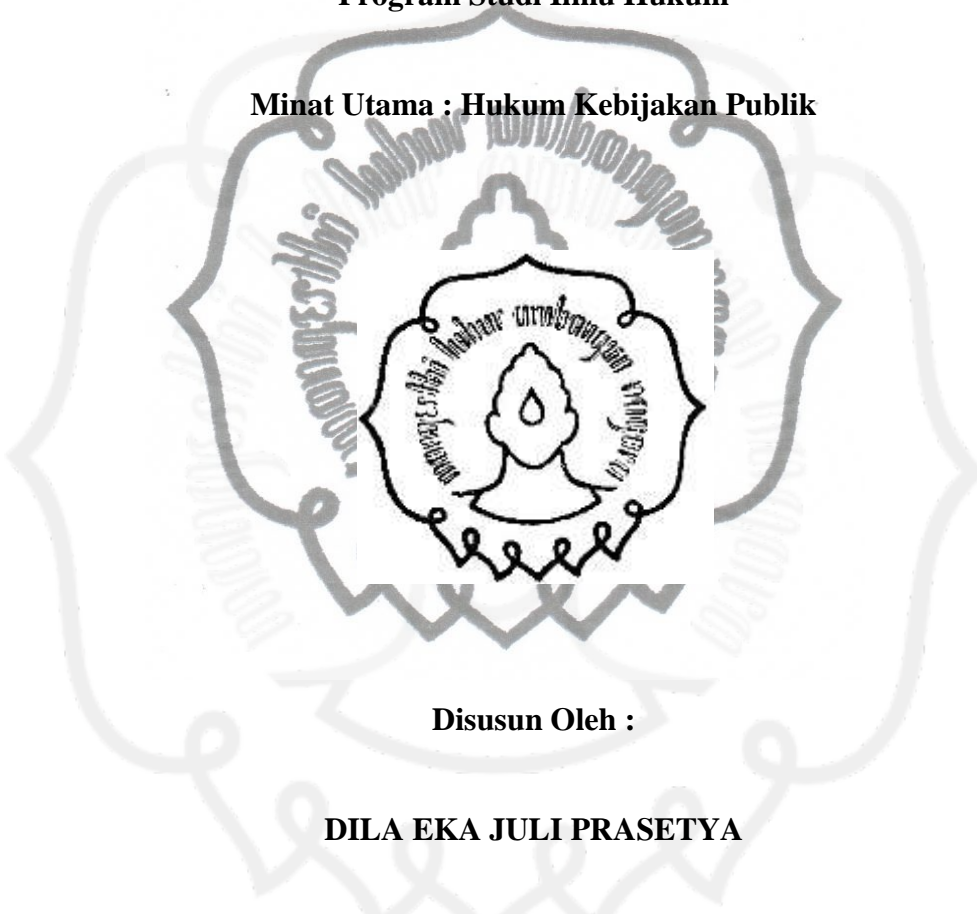
**POLITIK HUKUM HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA KABUPATEN/KOTA
DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

T E S I S

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Studi Ilmu Hukum

Minat Utama : Hukum Kebijakan Publik



Disusun Oleh :

DILA EKA JULI PRASETYA

NIM: S311508006

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2017

**POLITIK HUKUM HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA KABUPATEN/KOTA
DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

Disusun Oleh :

DILA EKA JULI PRASETYA

NIM: S311508006

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing:

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Pembimbing	Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum. NIP. 19780501 200312 1 002		4 / 2017
2. Co. Pembimbing	Prof. Dr. I Gusti Ayu KRH, S.H., M.M. NIP. 19721008 200501 2 001		5 / 2017

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Han Purwadi, S.H., M.Hum.

NIP. 19641201 200501 1 001


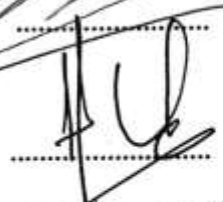


**POLITIK HUKUM HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA KABUPATEN/KOTA
DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

Disusun Oleh :

DILA EKA JULI PRASETYA

NIM: S311508006

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing:

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Dr. Djoko Wahyu Winarno, S.H., M.S. NIP. 19520511 198003 1 002		17/1/17
Sekretaris	Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. NIP. 19641201 200501 1 001		16/1-2017
Anggota Penguji	1. Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum. NIP. 19780501 200312 1 002		16/1/2017
	2. Prof. Dr. I Gusti Ayu KRH, S.H., M.M. NIP. 19721008 200501 2 001		16/1/2017

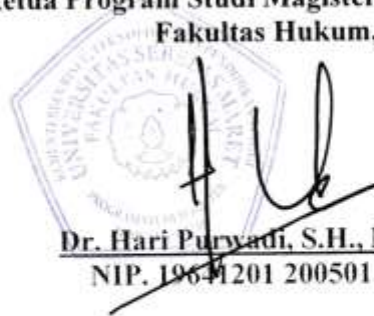
Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum,



Prof. Dr. M. Furqon Hidavatullah, M.Pd.
NIP. 19600727 198702 1 001



Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum.
NIP. 19641201 200501 1 001

PERNYATAAN

Nama : DILA EKA JULI PRASETYA

NIM : S311508006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “**POLITIK HUKUM HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**”, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila benar kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian tesis saya, dengan ini saya bersedia di-*upload* atau dipublikasi *website* Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Surakarta, 5 Januari 2017

Yang Membuat Pernyataan,



DILA EKA JULI PRASETYA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya sehingga tesis yang berjudul **“POLITIK HUKUM HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA”** ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tesis ini membahas tentang analisis politik hukum hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembahasan tersebut sebagai jalan untuk menemukan konstruksi ideal politik hukum hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa. Dengan tujuan akhir mewujudkan percepatan visi reformasi desa yang bersendikan pada kemandirian Desa.

Dalam kesempatan ini, penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan masukan bagi kesempurnaan

penulisan tesis ini, sehingga tesis ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik dan lancar.

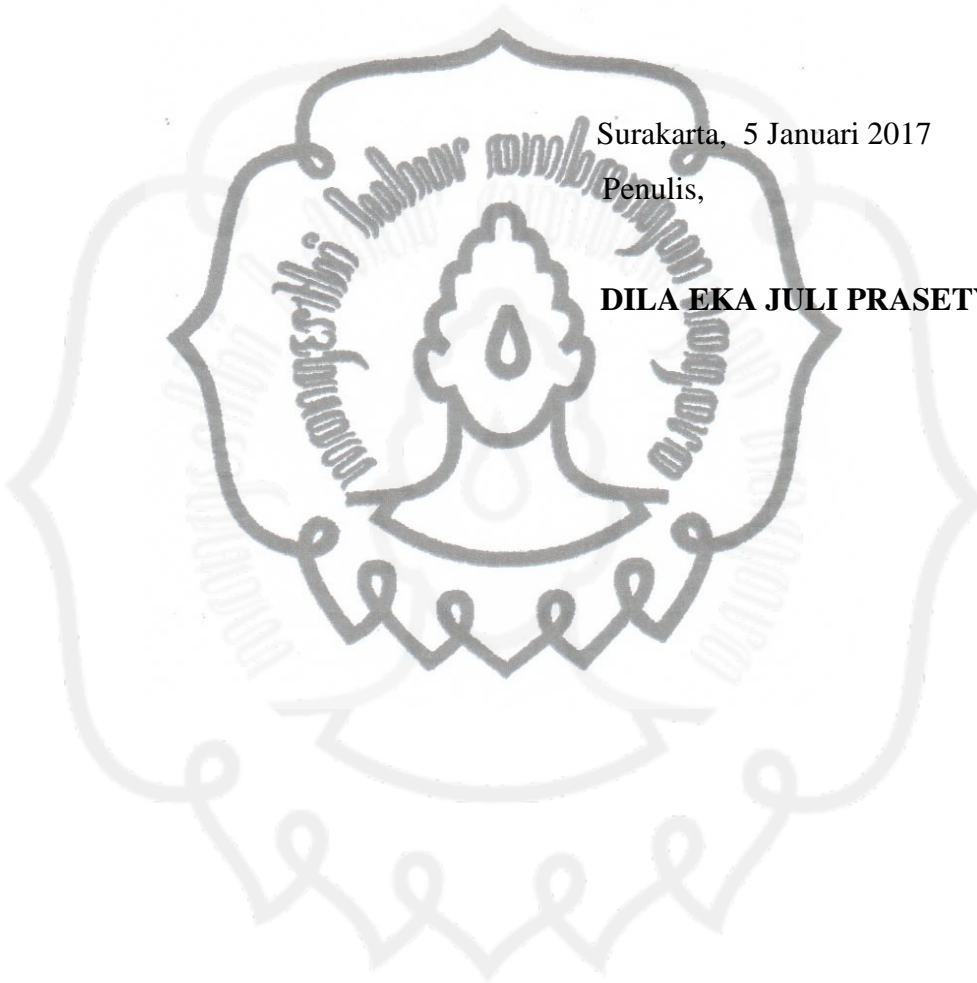
6. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan masukan bagi kesempurnaan penulisan tesis ini, sehingga tesis ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik dan lancar.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmunya dengan penuh dedikasi dan keikhlasan sehingga menambah wawasan dan pengetahuan penulis.
8. Bapak dan Ibu Staf Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu kelancaran administrasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga penyelesaian penulisan tesis ini.
9. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sartono HS dan Ibunda Heti Legawati, Kedua Adik tersayang Danang Suryo Kuncoro dan Dimas Wegig Tri Hartanto, yang telah mencurahkan doa, kasih sayang, perhatian dan kesabarannya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan lancar.
10. Teman-teman Kelas Hukum Kebijakan Publik dan teman-teman Program Studi Magister Ilmu Hukum angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan doa sehingga tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu.
11. Seluruh masyarakat Desa di pelosok Negara Republik Indonesia yang memberikan inspirasi kepada penulis untuk melakukan penelitian hukum tentang politik hukum hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik membangun demi perbaikan pada masa yang akan datang dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Surakarta, 5 Januari 2017

Penulis,

DILA EKA JULI PRASETYA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK INDONESIA	xiii
ABSTRAK INGGRIS	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Politik Hukum	9
1. Pengertian Politik Hukum	9
2. Karakter Politik Hukum	12
B. Hubungan Kewenangan	18
1. Organisasi dan Kekuasaan Negara	18
2. Konseptualisasi Wewenang	29
3. Otonomi Desa	37
C. Keuangan Desa	44
1. Pengertian Keuangan Desa	44

2. Pengelolaan Keuangan Desa	47
D. Penelitian yang Relevan	49
E. Kerangka Berpikir	51
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Sifat Penelitian	54
C. Pendekatan Penelitian	55
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	56
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	58
F. Teknik Analisa Bahan Hukum	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Politik Hukum Hubungan Kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa	60
1. Postur Pengelolaan Keuangan Desa	72
2. Subyek Pengelolaan Keuangan Desa	74
3. Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa	83
4. Kerangka Dana Desa	97
B. Konstruksi Ideal Politik Hukum Hubungan Kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa	104
1. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam Pancasila sebagai Pena Penguji Konstruksi Hubungan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa	107
2. Pemberdayaan Camat	127
3. Implikasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan	133

BAB V	PENUTUP	140
	A. Simpulan	140
	B. Implikasi	140
	C. Saran	141
DAFTAR PUSTAKA	142

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan Mandat dan Delegasi	36
Tabel 2	Penelitian yang Relevan	49
Tabel 3	Perbedaan Desa dan Kelurahan	61
Tabel 4	Perbedaan Karakteristik Undang-Undang yang Mengatur tentang Desa dari Masa ke Masa	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Desain Otonomi Desa	38
Gambar 2	Pengelolaan Keuangan Desa	49
Gambar 3	Alur Kerangka Berpikir	51
Gambar 4	Pengelolaan Keuangan Desa	95

ABSTRAK

Dila Eka Juli Prasetya, S311508006, 2017, Politik Hukum Hubungan Kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Selain itu, juga mengkaji tentang konstruksi ideal politik hukum hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa.

Penelitian ini adalah penelitian hukum. Sifat penelitian preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa: *Pertama*, Politik hukum hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan bahwa Pemerintah Desa memiliki posisi yang sangat vital dan strategis. Posisi ini sekaligus memberikan beban berat kepada Pemerintah Desa untuk mengurus hal-hal yang sifatnya administratif dalam pengelolaan keuangan Desa. *Kedua*, Konstruksi ideal politik hukum hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa adalah melimpahkan kewenangan Pemerintah Desa yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya administratif kepada Kecamatan. Sehingga Pemerintah Desa cukup menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta laporan realisasi anggaran secara sederhana, yang selanjutnya secara detail dan teknis administratif diselesaikan oleh Kecamatan.

Implikasi dari politik hukum yang berjalan saat ini adalah mengancam eksistensi otonomi Desa, karena hal-hal yang sifatnya administratif dalam pengelolaan keuangan Desa akan mengekang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sehingga perlu pelimpahan kewenangan hal-hal yang sifatnya administratif kepada Kecamatan. Selain itu, pelimpahan ini sebagai bentuk optimalisasi peran Kecamatan yang bukan hanya menjadi *alter ego* dari Bupati/Walikota.

Kata kunci: politik hukum, hubungan kewenangan, keuangan desa, konstruksi ideal

ABSTRACT

Dila Eka Juli Prasetya, S311508006, 2017, Legal Politics of Authority Relations between Regency/City Governments and Village Governments on Villages' Financial Management.

Thesis: The Graduate Program in Law Science, Sebelas Maret University, Surakarta.

The objective of this research is to analyze the legal politics of authority relations between the regency/city governments and the village governments. It also studies an ideal construction of the legal politics of authority relations between the regency/city governments and the village governments on the villages' financial management.

This research used the prescriptive normative legal research. It employed the statute, historical, and conceptual approaches. The data of research consisted of primary and secondary legal materials.

The results of research are as follows: Firstly, the legal politics of authority relations between the regency/city governments and the village governments on the villages' financial management following the enactment of Law Number: 6 of 2014 regarding Villages show that the village governments have a very vital and strategic position. Such a position at the same time raises big burdens to the villages to manage administrative matters on the villages' financial management. Secondly, the ideal construction of the legal politics of authority relations between the regency/city governments and the village governments is by delegating the village governments' authorities related to administrative matters to the governments at the sub-district levels so that they merely work on the preparations of income and expenditure budgets and reports on the budget realizations simply, but, their details and administrations technically are completed by the governments at the sub-district levels.

The implication of the on-going legal politics is that it threatens the existence of villages' autonomy because the administrative matters on the villages' financial management will restrict the administrations of the village governments. Thus, the delegation of authority on the administrative matters to the upper governments (sub-district governments) is required. In addition, such a delegation is a form of role optimization of the sub-district governments, which is not merely as an alter ego of the regents or mayors.

Keywords: legal politics, authority relations, villages' financial management, ideal construction